

PENCABUTAN – PELAYANAN PUBLIK – PELAYANAN PERIZINAN

2022

PERBUP NO. 34, BD. 2022. NO. 34 KAB. PEMALANG :3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan perkembangan sistem aplikasi pelayanan perijinan dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PELayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perbup No. 30 Tahun 2018; Perbup No. 27 Tahun 2021
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Desember 2022
- Terdiri atas 2 Pasal